

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 - o. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 - t. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 - u. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 - v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
- z. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- aa. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- dd. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- ee. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 70);
- hh. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- jj. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- kk. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
	2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan OPD
	2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
BAB III	KEBIJAKAN AKUNTANSI
	3.1 Entitas akuntansi/Entitas pelaporan keuangan daerah
	3.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	3.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah
BAB IV	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
	4.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	a. Pendapatan Daerah
	b. Belanja Daerah
	c. Transfer
	d. Pembiayaan
	4.2 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan SAL
	4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca
	a. Aset
	b. Kewajiban
	c. Ekuitas
	4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
	a. Pendapatan Laporan Operasional
	b. Beban
	c. Kegiatan Non Operasional
	d. Pos-pos Luar Biasa
	e. Surplus (Defisit) LO
	4.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
	4.6 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
	4.7 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB V	INFORMASI NON KEUANGAN
BAB VI	PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Lumajang Tahun 2021 sebagai berikut.

a. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Lumajang meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	0,-	0,-	0	0,-
2	Belanja Barang	515.018.400,-	436.261.682,-	84,71	75.103.153,-
	Jumlah Belanja	515.018.400,-	436.261.682,-	84,71	75.103.153,-

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel..... Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 – 2023

Belanja	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Pegawai	106.950.400,-	41.490.700,-	0,-	0,-	0,-
Belanja Barang	394.072.401,-	520.580.867,-	436.261.682,-	0,-	0,-
Belanja Modal	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
Jumlah	501.022.801,-	562.071.567,-	436.261.682,-	0,-	0,-
% Kenaikan					

(dalam Tabel Perkembangan Realisasi Belanja Operasi pembandingan dari tahun 2020 s/d 2024, Pada Tahun 2021 Perubahan Nomenklatur Organisasi dari semula Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa diganti Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2020 sebagai berikut :

Program 1	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		
Kegiatan 1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		
Jenis Belanja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi
- Belanja Pegawai	0,-	0,-	0,-
- Belanja Barang & Jasa	0,-	54.865.000,-	24.739.700,-
- Belanja Modal	0,-	0,-	0,-
Jumlah Kegiatan 1	0,-	54.865.000,-	24.739.700,-
Kegiatan 2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik		
Jenis Belanja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai	0,-	0,-	0,-
Belanja Barang & Jasa	203.220.000,-	208.970.000,-	196.329.000,-
Belanja Modal	0,-	0,-	0,-
Jumlah Kegiatan 2	203.220.000,-	208.970.000,-	196.329.000,-
Kegiatan 3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
Jenis Belanja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai	0,-	0,-	0,-
Belanja Barang & Jasa	0,-	5.025.000,-	5.025.000,-
Belanja Modal	0,-	0,-	0,-
Jumlah Kegiatan 3	0,-	5.025.000,-	5.025.000,-
Program 2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Kegiatan 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Jenis Belanja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi
- Belanja Pegawai	0,-	0,-	0,-
- Belanja Barang & Jasa	102.086.400,-	102.086.400,-	72.120.707,-
- Belanja Modal	0,-	0,-	0,-
Jumlah Kegiatan 1	102.086.400,-	102.086.400,-	72.120.707,-
Kegiatan 2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Jenis Belanja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi
- Belanja Pegawai	0,-	0,-	0,-
- Belanja Barang & Jasa	139.200.000,-	118.800.000,-	112.068.695,-
- Belanja Modal	0,-	0,-	0,-
Jumlah Kegiatan 2	139.200.000,-	118.800.000,-	112.068.695,-
Kegiatan 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

Jenis Belanja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi
- Belanja Pegawai	0,-	0,-	0,-
- Belanja Barang & Jasa	4.545.000,-	8.352.000,-	6.812.080,-
- Belanja Modal	0,-	0,-	0,-
Jumlah Kegiatan 3	4.545.000,-	8.352.000,-	6.812.080,-
Kegiatan 4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Jenis Belanja	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi
- Belanja Pegawai	0,-	0,-	0,-
- Belanja Barang & Jasa	12.360.000,-	16.920.000,-	16.920.000,-
- Belanja Modal	0,-	0,-	0,-
Jumlah Kegiatan 4	12.360.000,-	16.920.000,-	16.920.000,-

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Lumajang selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2019 s.d. 2023

Posisi Keuangan	2019	2020	2021	2022	2023
1. Aset	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
2. Kewajiban	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
3. Ekuitas	53.649.305,30,-	139.672.972,20,-	553.553.981,60,-	0,-	0,-
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	53.649.305,30,-	139.672.972,20,-	553.553.981,60,-	0,-	0,-

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparaturnya terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja,

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
Belanja Operasi	515.018.400,-	436.261.682,-	482.854.389,-

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel : Realisasi Belanja Operasi tahun 2020 dan 2019

No	Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	0,-	0,-		41.490.700,-
2	Belanja Barang dan Jasa	515.018.400,-	436.261.682,-		441.363.689,-
	Jumlah	515.018.400,-	436.261.682,-		482.854.389,-

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(a) Belanja Pegawai	0,-	0,-	41.490.700,-

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD..

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	0,-	0,-	0	0,-
2	Tunjangan keluarga	0,-	0,-	0	0,-
3	Tunjangan jabatan	0,-	0,-	0	0,-
4	Tunjangan fungsional	0,-	0,-	0	0,-
5	Tunjangan fungsional umum	0,-	0,-	0	0,-
6	Tunjangan beras	0,-	0,-	0	0,-
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	0,-	0,-	0	0,-
8	Pembulatan gaji	0,-	0,-	0	0,-
	Jumlah belanja pegawai tidak langsung	0,-	0,-	0	0,-
	BELANJA LANGSUNG				
1.	Honorarium pejabat pelaksana				

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
	teknis Kegiatan, Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa				
2.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	0,-	0,-	0	0,-
3.	Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	0,-	0,-	0	0,-
4.	Honorarium Pengurus Barang Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	0,-	0,-	0	0,-
5.	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	0,-	0,-	0	0,-
6.	Honorarium penanggungjawab pengelola keuangan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	0,-	0,-	0	0,-
7.	Uang Lembur PNS Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Proses Pengadaan Barang dan Jasa	0,-	0,-	0	0,-
8.	Uang Lembur PNS Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	0,-	0,-	0	0,-
9.	Uang Lembur PNS Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang – undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	0,-	0,-	0	0,-
10	Hr Pengadaan barang/jasa Keg. Pelayanan Administrasi dan Operasional	0,-	0,-	0	1.866.000,-
11	Hr Pengurus Barang Keg. Pelayanan Administrasi dan Operasional	0,-	0,-	0	1.128.000,-
12	Hr Penerima Hasil Pekerjaan Keg. Pelayanan Administrasi dan Operasional	0,-	0,-	0	400.000,-
13	Hr Pengguna Anggaran Keg. Pelayanan Administrasi dan Operasional	0,-	0,-	0	6.504.000,-
14	Hr Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Keg. Pelayanan Administrasi dan Operasional	0,-	0,-	0	5.798.000,-
15	Hr. Bendahara Pengeluaran Pembantu Keg. Pelayanan Administrasi dan Operasional	0,-	0,-	0	5.113.200,-
16	Uang Lembur Kegiatan Keg. Pelayanan Administrasi dan Operasional	0,-	0,-	0	9.971.500,-

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
17	Uang Lembur Kegiatan Penyusunan Pedoman Teknis Pengadaan Barang/Jasa	0,-	0,-	0	0,-
18	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	0,-	0,-	0	950.000,-
19	Uang Lembur Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	0,-	0,-	0	10.710.000,-
20	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa	0,-	0,-	0	0,-
21	Uang Lembur Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa	0,-	0,-	0	0,-
22	Uang Lembur Kegiatan Penyusunan Inventarisasi Pengadaan Barang/Jasa	0,-	0,-	0	0,-
23	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Pengadaan	0,-	0,-	0	348.000,-
	Jumlah Belanja Pegawai Langsung	0,-	0,-	0	41.490.000,-

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(b) Belanja Barang dan Jasa	515.018.400,-	436.261.682,-	430.201.232,-

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 dan 2021 sebagai berikut.

Tabel Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2021

No	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Persediaan	0,-	0,-	15.698.308,-
2	Belanja Jasa	448.646.400,-	397.408.102,-	401.187.644,-
3	Belanja Pemeliharaan	25.272.000,-	23.732.080,-	13.315.280,-
4	Belanja Perjalanan Dinas	41.100.000,-	15.121.500,-	0,-
5	Belanja Lainnya	0,-	0,-	0,-
	Jumlah	515.018.400,-	436.261.682,-	430.201.232

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/ pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah), terinci sebagai berikut.

Tabel Realisasi Belanja Persediaan tahun 2021

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja alat tulis kantor	0,-	0,-
2	Belanja dokumen/administrasi tender	0,-	0,-
3	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	0,-	0,-
4	Belanja peranko, materai, dan benda pos lainnya	0,-	0,-
5	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,-	0,-
6	Belanja bahan bakar minyak/gas	0,-	0,-
7	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran	0,-	0,-
8	Belanja pengisian tabung gas	0,-	0,-
9	Belanja alat kesehatan/kedokteran habis pakai	0,-	0,-
10	Belanja peralatan pengolah tanah dan tanaman sekali pakai	0,-	0,-
11	Belanja peralatan bangunan sekali pakai	0,-	0,-
12	Belanja peralatan perikanan sekali pakai	0,-	0,-
13	Belanja cinderamata	0,-	0,-
14	Belanja alat olah raga habis pakai	0,-	0,-
15	Belanja karangan bunga/bunga tabur	0,-	0,-
16	Belanja pakan ikan/ternak	0,-	0,-
17	Belanja pupuk	0,-	0,-
18	Belanja make up	0,-	0,-
19	Belanja umbul(umbul/bendera	0,-	0,-
20	Belanja spanduk/baliho/banner	0,-	0,-
21	Belanja alat penunjang kesehatan/kedokteran habis pakai	0,-	0,-
22	Belanja bahan baku bangunan	0,-	0,-
23	Belanja bahan/bibit tanaman	0,-	0,-
24	Belanja bibit ternak	0,-	0,-
25	Belanja bahan obat(obatan	0,-	0,-
26	Belanja bahan kimia	0,-	0,-
27	Belanja bahan makanan	0,-	0,-
28	Belanja bahan sandang	0,-	0,-
29	Belanja bahan baku praktek/pelatihan	0,-	0,-
30	Belanja perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek	0,-	0,-
31	Belanja bahan/sampel uji lab	0,-	0,-
32	Belanja cetak	0,-	0,-
33	Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan	0,-	0,-
34	Belanja makanan dan minuman rapat	0,-	0,-
35	Belanja makanan dan minuman tamu	0,-	0,-

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
36	Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu	0,-	0,-
37	Belanja makanan dan minuman pasien	0,-	0,-
38	Belanja pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah	0,-	0,-
39	Belanja pakaian sipil harian (PSH)	0,-	0,-
40	Belanja pakaian sipil lengkap (PSL)	0,-	0,-
41	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	0,-	0,-
42	Belanja pakaian dinas upacara (PDU)	0,-	0,-
43	Belanja pakaian sipil resmi (PSR)	0,-	0,-
44	Belanja pakaian dinas lapangan (PDL)	0,-	0,-
45	Belanja pakaian kerja lapangan	0,-	0,-
46	Belanja pakaian adat daerah	0,-	0,-
47	Belanja pakaian batik tradisional	0,-	0,-
48	Belanja pakaian olah raga	0,-	0,-
49	Belanja pakaian seragam	0,-	0,-
50	Belanja pakaian kegiatan tertentu	0,-	0,-
51	Belanja hadiah barang	0,-	0,-
52	Belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0,-	0,-
53	Belanja barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga (barang jadi)	0,-	0,-
54	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang	0,-	0,-
	Jumlah	0,-	0,-

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; belanja pelatihan/kursus; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.397.408.102,- (Tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu seratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel : Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021

No	Belanja jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja telepon	2.066.400,-	1.185.719,-
2	Belanja air	0,-	0,-
3	Belanja listrik	0,-	0,-
4	Belanja jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	0,-	0,-
5	Belanja surat kabar/majalah	0,-	0,-
6	Belanja kawat/faksimili/internet	100.020.000,-	70.934.988,-
7	Belanja paket/pengiriman	0,-	0,-
8	Belanja sertifikasi	0,-	0,-

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

No	Belanja jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021
9	Belanja jasa transaksi keuangan	0,-	0,-
10	Belanja jasa administrasi pemungutan retribusi parkir	0,-	0,-
11	Belanja jasa siaran radio	0,-	0,-
12	Belanja jasa transportasi/akomodasi	0,-	0,-
13	Belanja dokumentasi	0,-	0,-
14	Belanja dekorasi	0,-	0,-
15	Belanja jasa tera/kir	0,-	0,-
16	Belanja jasa promosi/publikasi/advertising	0,-	0,-
17	Belanja jasa gelombang radio/televisi	0,-	0,-
18	Belanja jasa pemeliharaan kesehatan bupati/wakil bupati	0,-	0,-
19	Belanja jasa uji laboratorium	0,-	0,-
20	Belanja jasa cleaning service	0,-	0,-
21	Belanja pajak bumi dan bangunan	0,-	0,-
22	Belanja pajak air tanah	0,-	0,-
23	Belanja jasa tenaga keamanan	0,-	0,-
24	Belanja penggantian transport	0,-	0,-
25	Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	0,-	0,-
26	Belanja jasa pendukung kegiatan	0,-	0,-
27	Belanja jasa laundry	0,-	0,-
28	Belanja jasa administrasi pemungutan PBB P2	0,-	0,-
29	Belanja jasa juri/wasit	0,-	0,-
30	Belanja jasa petugas korsik dan drum band	0,-	0,-
31	Belanja jasa penata rias/make up	0,-	0,-
32	Belanja jasa event organizer	0,-	0,-
33	Belanja jasa fumigasi	0,-	0,-
34	Belanja jasa siaran televisi	0,-	0,-
35	Belanja jasa pembuatan video	0,-	0,-
36	Belanja jasa kalibrasi alat kesehatan	0,-	0,-
37	Belanja jasa pengolahan limbah medis	0,-	0,-
38	Belanja jasa pemeliharaan kesehatan DPRD	0,-	0,-
39	Belanja jasa penyelenggaraan diklat	0,-	0,-
40	Belanja jasa sewa pengharum ruangan	0,-	0,-
41	Belanja retribusi pelayanan persampahan	0,-	0,-
42	Belanja jasa perawatan kesehatan ibu dan bayi resiko tinggi	0,-	0,-
43	Belanja premi asuransi kesehatan	0,-	0,-
44	Belanja premi asuransi ketenagakerjaan	0,-	0,-
45	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	0,-	0,-
46	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	0,-	0,-
47	Belanja sewa tanah/lahan	0,-	0,-
48	Belanja sewa penginapan	0,-	0,-
49	Belanja sewa sarana mobilitas darat	0,-	0,-
50	Belanja sewa eskavator	0,-	0,-
51	Belanja sewa mesin proses	0,-	0,-
52	Belanja sewa electric generating set	0,-	0,-
54	Belanja sewa alat kantor	0,-	0,-
55	Belanja sewa alat rumah tangga	0,-	0,-
56	Belanja sewa komputer	0,-	0,-
57	Belanja sewa meja dan kursi	0,-	0,-
58	Belanja sewa alat studio	0,-	0,-

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

No	Belanja jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021
59	Belanja sewa barang bercorak kebudayaan	0,-	0,-
60	Belanja sewa tenda dan perlengkapannya	0,-	0,-
61	Belanja beasiswa tugas belajar S1	0,-	0,-
62	Belanja beasiswa tugas belajar S2	0,-	0,-
63	Belanja kursus(kursus singkat/pelatihan	0,-	0,-
64	Belanja sosialisasi	0,-	0,-
65	Belanja bimbingan teknis	0,-	0,-
66	Belanja pendidikan struktural	0,-	0,-
67	Belanja fit and proper test	0,-	0,-
68	Belanja jasa konsultasi penelitian	0,-	0,-
69	Belanja jasa konsultasi perencanaan	0,-	0,-
70	Belanja jasa konsultasi pelaporan	0,-	0,-
71	Belanja jasa konsultasi pengawasan	0,-	0,-
72	Belanja jasa konsultasi hukum	0,-	0,-
73	Belanja jasa konsultasi IT	0,-	0,-
74	Belanja jasa konsultasi evaluasi	0,-	0,-
75	Belanja jasa konsultasi psikologi	0,-	0,-
76	Belanja upah/ongkos tenaga kerja harian	0,-	0,-
77	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	346.560.000,-	325.287.395,-
78	Belanja upah/ongkos tenaga kerja borongan	0,-	0,-
79	Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan	0,-	0,-
80	Belanja upah/ongkos tenaga pendidik	0,-	0,-
81	Belanja tambahan upah tenaga kerja pendidik	0,-	0,-
82	Belanja Barang dan Jasa pada BLUD	0,-	0,-
83	Belanja kursus(kursus singkat/pelatihan	0,-	0,-
84	Belanja bimbingan teknis	0,-	0,-
85	Belanja praktek industri	0,-	0,-
86	Belanja Praktek Klinik	0,-	0,-
87	Belanja Ujian	0,-	0,-
88	Belanja peta	0,-	0,-
89	Belanja operasional pemeriksaan internal reguler	0,-	0,-
90	Belanja Jasa Dana BOS	0,-	0,-
	Jumlah	448.646.400,-	397.408.102,-

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 23.732.080,- (Tiga belas juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh rupiah) terinci sebagai berikut.

Tabel : Realisasi Belanja Pemeliharaan Tahun 2021

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja bahan bakar minyak dan pelumas	5.690.000,-	5.565.280,-
2	Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang		
3	Belanja jasa kir kendaraan dinas/operasional		
4	Belanja STNK kendaraan dinas/operasional		

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
5	Belanja pemeliharaan grader		
6	Belanja pemeliharaan excavator		
7	Belanja pemeliharaan asphal equipment		
8	Belanja pemeliharaan electric generating set		
9	Belanja pemeliharaan pompa		
10	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor perorangan		
11	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor berpenumpang		
12	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor angkutan barang		
13	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor khusus		
14	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda dua		
15	Belanja pemeliharaan kendaraan bermotor beroda tiga		
16	Belanja pemeliharaan kendaraan tak bermotor angkutan barang		
17	Belanja pemeliharaan alat angkut apung bermotor berpenumpang		
18	Belanja pemeliharaan alat angkut apung tak bermotor berpenumpang		
19	Belanja pemeliharaan alat kalibrasi		
20	Belanja pemeliharaan alat ukur lainnya		
21	Belanja pemeliharaan alat prosesing		
22	Belanja pemeliharaan alat pemeliharaan tanaman		
23	Belanja pemeliharaan mesin tik		
24	Belanja pemeliharaan alat reproduksi (pengganda)		
25	Belanja pemeliharaan alat penyimpanan perlengkapan kantor		
26	Belanja pemeliharaan office use		
27	Belanja pemeliharaan meubelair		
28	Belanja pemeliharaan alat pembersih		
29	Belanja pemeliharaan alat pendingin		
30	Belanja pemeliharaan alat dapur		
31	Belanja pemeliharaan home use		
32	Belanja pemeliharaan alat pemadam kebakaran		
33	Belanja pemeliharaan komputer unit/jaringan		
34	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	16.920.000,-	16.920.000,-
35	Belanja pemeliharaan kursi kerja pejabat		
36	Belanja pemeliharaan peralatan studio visual		
37	Belanja pemeliharaan peralatan studio video dan film		
38	Belanja pemeliharaan alat komunikasi telephone		
39	Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio SSB		
40	Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio HF/FM		
41	Belanja pemeliharaan alat komunikasi radio VHF		
42	Belanja pemeliharaan alat kedokteran umum		
43	Belanja pemeliharaan alat kedokteran gigi		
44	Belanja pemeliharaan alat rontgen		
45	Belanja pemeliharaan alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan		
46	Belanja pemeliharaan alat kesehatan perawatan		
47	Belanja pemeliharaan alat kesehatan olah raga		
48	Belanja pemeliharaan alat laboratorium bahan bangunan konstruksi		
49	Belanja pemeliharaan alat laboratorium aspal cat & kimia		
50	Belanja pemeliharaan alat laboratorium mekanik tanah dan batuan		
51	Belanja pemeliharaan alat laboratorium umum		
52	Belanja pemeliharaan alat laboratorium kedokteran		

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
53	Belanja pemeliharaan alat laboratorium fisika		
54	Belanja pemeliharaan alat laboratorium pertanian		
55	Belanja pemeliharaan alat laboratorium biologi		
56	Belanja pemeliharaan alat laboratorium lingkungan		
57	Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor		
58	Belanja pemeliharaan bangunan kesehatan		
59	Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat ibadah		
60	Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat pendidikan		
61	Belanja pemeliharaan bangunan gedung tempat olah raga		
62	Belanja pemeliharaan bangunan gedung pertokoan/koperasi pasar		
63	Belanja pemeliharaan bangunan stasiun bus		
64	Belanja pemeliharaan bangunan gedung perpustakaan		
65	Belanja pemeliharaan bangunan pengujian kelaikan		
66	Belanja pemeliharaan bangunan taman/wisata/rekreasi		
67	Belanja pemeliharaan rumah negara golongan I		
68	Belanja pemeliharaan rumah negara golongan II		
69	Belanja pemeliharaan rumah negara golongan III		
70	Belanja pemeliharaan flat/rumah susun		
71	Belanja pemeliharaan bangunan bersejarah		
72	Belanja pemeliharaan tugu/tanda batas		
73	Belanja pemeliharaan rambu bersuar		
74	Belanja pemeliharaan jalan kabupaten/kota		
75	Belanja pemeliharaan penunjang jalan kabupaten/kota		
76	Belanja pemeliharaan jembatan kabupaten/kota		
77	Belanja pemeliharaan bangunan pembawa irigasi		
78	Belanja pemeliharaan bangunan pengaman air kotor		
79	Belanja pemeliharaan air tanah dalam		
80	Belanja pemeliharaan instalasi air tanah dangkal		
81	Belanja pemeliharaan instalasi air buangan domestik		
82	Belanja pemeliharaan instalasi pengolahan sampah organik		
83	Belanja pemeliharaan instalasi gardu listrik induk		
84	Belanja pemeliharaan jaringan transmisi		
85	Belanja pemeliharaan jaringan distribusi		
86	Belanja pemeliharaan jaringan telepon di atas tanah		
87	Belanja pemeliharaan barang-barang perpustakaan		
88	Belanja pemeliharaan barang bercorak kebudayaan		
89	Belanja pemeliharaan tanaman		
90	Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud		
91	Belanja pemeliharaan taman		
92	Belanja Pemeliharaan Dana BOS		
	Jumlah	25.272.000,-	23.732.080,-

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 15.121.500,- (Lima belas juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), .

Tabel : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,-	0,-
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	31.100.000,-	15.121.500,-
	Jumlah	41.100.000,-	15.121.500,-

(5) Belanja Lainnya

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.0,- (Nol rupiah) terinci sebagai berikut.

Tabel : Realisasi Belanja Lainnya Tahun 2021

No	Belanja Lainnya	Anggaran 2021	Realisasi 2021

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)
(c) Belanja Modal	<u>0,-</u>	<u>0,-</u>	<u>0,-</u>

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel : Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Tanah				
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,-	0,-	0	0,-
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,-	0,-	0	0,-
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,-	0,-	0	0,-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-	0	0,-
6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,-	0,-	0	0,-
	Jumlah	0,-	0,-	0	0,-

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

Tabel : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas di bendahara pengeluaran	0,-	0,-
Kas di bendahara penerimaan	0,-	0,-
Kas lainnya	0,-	0,-
Piutang pajak	0,-	0,-
Piutang retribusi	0,-	0,-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0,-	0,-
Biaya Dibayar Dimuka	0,-	0,-
Persediaan	6.212.153,-	3.233.687,-
Jumlah	6.212.153,-	3.233.687,-

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel Mutasi kas di bendahara pengeluaran tahun 2021

1. Saldo 31 Desember 2020		0,-
2. Penerimaan :		
- SP2D UP	20.000.000,-	
- SP2D TUP	0,-	
- SP2D GU	224.263.297,-	
- Penerimaan PFK	0,-	
Jumlah Penerimaan		244.263.297,-
3. Pengeluaran :		
- SPJ UP/GU	224.263.297,-	
- SPJ GU Nihil	19.293.080,-	
- Setor kembali sisa TUP	0,-	
- Setor kembali sisa UP/GU	706.920,-	
- Pengeluaran PFK	0,-	
- Setor kembali sisa UP/GU/TU tahun lalu	0,-	
Jumlah pengeluaran		244.263.297,-
4. Saldo 31 Desember 2021		0,-

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
8) Persediaan	<u>6.212.153,-</u>	<u>3.465.687,-</u>

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel Laporan Persediaan Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2020		0,-
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0,-
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		0,-
4	Ditambah :		
5	Belanja Persediaan LRA 2021	6.212.153,-	
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	0,-	
7	Belanja Persediaan BOS	0,-	
8	Penerimaan hibah persediaan	0,-	
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	6.212.153,-	
10	Dikurangi :		
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2021	0,-	
12	Pengeluaran hibah persediaan	0,-	
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)		6.212.153,-
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan		6.212.153,-
15	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)		6.212.153,-
16	Persediaan tahun 2021 (14+15)		6.212.153,-

Tabel 1. Daftar Persediaan Tahun 2021 dan 2020

		<i>dalam rupiah</i>	
No	Persediaan	2021	2020
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	6.172.753,-	2.867.687,-
2	Persediaan Perangko	0,-	60.000,-
3	Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih	0,-	366.000,-
4	Persediaan Barang Cetak	39.400,-	172.000,-
	Jumlah	6.212.153,-	3.465.687,-

b. ASET TETAP

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Aset Tetap	<u>1.442.770.028,-</u>	<u>1.421.947.028,-</u>

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
- Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
- Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
- Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
- Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Tabel Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
2	Peralatan dan Mesin	1.421.947.028,-	0,-	20.823.000,-	0,-	1.442.770.028,-
3	Gedung dan Bangunan	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
5	Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
	Jumlah	1.421.947.028,-	0,-	1.109.714.340,-	0,-	1.442.770.028,-

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah merger aset dari eks Bagian Pembangunan sebagai berikut.

- a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp. 20.823.000,- meliputi:
 - (1) Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp. 0,-
 - (2) Realisasi belanja modal menambah aset tetap KDP Rp.0,-
 - (3) Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp. 0,-
 - (4) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp. 0,-
 - (5) Reklasifikasi dari aset lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp. 0,-
 - (6) Utang Belanja Modal Peralatan Rp. 0,-
 - (7) Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp. 0,-
 - (8) Mutasi masuk (transfer in) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp. 20.823.000,-
- b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp. 0,- meliputi:
 - (1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp. 0,-
 - (2) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp. 0,-
 - (3) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain – lain sebesar Rp. 0,-
 - (4) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke ekstra komptabel sebesar Rp. 0,- dan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

(5) Mutasi keluar (transfer out) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp. 0,-

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(a) Tanah	0,-	0,-

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- terinci sebagai berikut :

Tabel Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah A	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
2	Tanah B	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
3	Tanah C	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
4	dsb	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
	Jumlah	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	1.442.770.028,-	1.421.947.028,-

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 1.442.770.028,- dan Rp.1.421.947.028,- terinci sebagai berikut :

Tabel Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat besar	42.681.000,-	0,-			42.681.000,-
2	Alat-alat Angkutan	248.993.600,-	0,-			248.993.600,-
3	Alat-alat bengkel dan Alat Ukur	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
4	Alat-alat Pertanian	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.111.908.678,-	0,-	20.823.000,-	0,-	1.132.731.678,-
6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	18.363.750,-	0,-	0,-	0,-	0,-
7	Alat-alat Kedokteran	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
8	Alat-alat Laboratorium	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
9	Alat-alat Persenjataan dan Keamanan	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
	Jumlah	1.421.947.028,-	0,-	20.823.000,-	0,-	1.442.770.028,-

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

Catatan:

Pada Tahun 2021 terjadi penambahan Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga Mutasi Masuk antar SKPD dari Bagian Umum Setda Kabupaten Lumajang.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	0,-	0,-

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan monumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

**Tabel Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2021**

dalam rupiah

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
2	Monumen	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
	Jumlah	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(d) Jalan, Irigasi & Jaringan	0,-	0,-

Jumlah aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan milik Pemerintah Kabupaten Lumajang terinci pada tabel berikut ini.

**Tabel..... Daftar Jenis Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Milik Pemerintah Kabupaten
Lumajang per 31 Desember 2020**

No	Jenis	Saldo 31 Desember 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	Saldo 31 Desember 2021
1	Jalan	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
2	Jembatan	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
3	Bangunan Air/Irigasi	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
4	Instalasi	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
5	Jaringan	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
	Jumlah	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(e) Aset Tetap Lainnya	0,-	0,-

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
1	Buku dan Pepustakaan	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
3	Hewan Ternak dan Tanaman	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-
	Jumlah	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
(f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,-	0,-

Saldo Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Mutasi aset tetap lainnya sebagai berikut.

Tabel Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap KDP per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Des 2020	Koreksi	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2021
1						
2						
3						

c. ASET LAINNYA

	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	(Rp)	(Rp)
1) Aset Lainnya	166.210.000,-	166.210.000,-

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 166.210.000,- sedangkan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 166.210.000,-, merupakan mutasi masuk Aset lainnya (Aset tak berwujud) dari eks Bagian

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

Pembangunan dalam bentuk *Aplikasi Software Elektronik MONEV (SMAP)* terinci sebagai berikut :

Tabel Daftar Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2021
1	Tuntutan Ganti Rugi	0,-	0,-	0,-	0,-
2	Aset Tak Berwujud	166.210.000,-	0,-	0,-	166.210.000,-
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,-	0,-	0,-	0,-
4	Aset Lain lain	0,-	0,-	0,-	0,-
	Jumlah	166.210.000,-	0,-	0,-	166.210.000,-

Utang Belanja

Saldo utang belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 17.252.656,- merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian telepon, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

Tabel Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Jasa telepon	93.500,-	103.656,-	0,-	103.656,-
2	Jasa internet	15.073.999,-	17.149.000,-	0,-	17.149.000,-
3	Langganan Koran	0,-	0,-	0,-	0,-
	Jumlah	15.167.499,-	17.252.656,-	0,-	17.252.656,-

d. EKUITAS

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Ekuitas	<u>(553.553.981,60),-</u>	<u>(139.672.972,20),-</u>

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel Daftar Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Akun	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Jumlah Aset	0,-	0,-
2	Jumlah Kewajiban	0,-	0,-
3	Ekuitas (1(2))	0,-	0,-

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

Tabel 2. Daftar Rincian Ekuitas Pemerintah Kabupaten Lumajang per 31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Uraian	2021	2020
1	Ekuitas Awal		0,-
2	Surplus (Defisit) LO	(553.553.981,60),-	(786.344.564,60,-)
3	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi / kesalahan mendasar	0,-	0,-
4	EKUITAS AKHIR	(553.553.981,60),-	(139.672.972,20,-)

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskana di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

a. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dibandingkan dengan periode sebelumnya.

b. BEBAN

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Beban Pegawai-LO	0,-	41.490.700,-

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Bagian Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2021

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.	%	REALISASI 2020 Rp
1	2	4	5	6	7
1.	HONORARIUM PNS	0,-	0,-	0	20.809.200,-
2	UANG LEMBUR PNS	0,-	0,-	0	20.681.500,-
	Jumlah Beban Pegawai	0,-	0,-	0	41.490.700,-

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

Jumlah Honorarium PNS sejumlah Rp. 0,- terdiri dari :

Tabel Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2021

NO	RINCIAN OBYEK BELANJA	REALISASI Rp.
1	2	5
1.	HONORARIUM PNS	
	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,-
	Honorarium Penyimpan dan Pengurus Barang	0,-
	Honorarium Penerima Hasil Pekerjaan	0,-
	Honorarium Pengguna anggaran	0,-
	Honorarium Pejabat pelaksana teknis kegiatan	0,-
	Honorarium Bendahara	0,-
	Jumlah Honorarium PNS	0,-

2) Beban Barang dan Jasa Rp. 436.261.682,-

Beban Barang Jasa dari Penyerapan Anggaran	Rp. 436.261.682,-
Beban Barang Jasa lainnya	Rp. 0,-
	Rp. 436.261.682,-

1. Terdiri dari belanja barang/jasa dari penyerapan anggaran sejumlah Rp. 436.261.682,- dengan penjelasan :

Tabel 3.3 Realisasi Beban Barang & Jasa tahun 2021

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Beban Persediaan	19.515.000,-	16.604.700,-	91.532.857,-
2	Beban Jasa	220.886.400,-	184.189.402,-	415.732.730,-
3	Beban Pemeliharaan	16.920.000,-	16.920.000,-	13.315.280,-
4	Beban Perjalanan Dinas	41.100.000,-	15.121.500,-	0,-
5	Beban Lainnya	0,-	0,-	0,-
	Jumlah	298.421.400,-	232.835.602,-	520.580.867,-

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

(1) Beban Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/ pihak ke tiga. Beban Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.16.604.700,- terinci sebagai berikut.

Tabel 3.4 Realisasi Beban Persediaan tahun 2021

No.	Beban Persediaan	Realisasi
1	Beban alat tulis kantor	0,-
2	Beban dokumen/administrasi tender	0,-
3	Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering)	0,-
4	Beban perangko, materai, dan benda pos lainnya	0,-
5	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih	0,-
6	Beban bahan bakar minyak/gas	0,-
7	Beban pengisian tabung pemadam kebakaran	0,-
8	Beban pengisian tabung gas	0,-
9	Beban alat kesehatan/kedokteran habis pakai	0,-
10	Beban peralatan pengolah tanah dan tanaman sekali pakai	0,-
11	Beban peralatan bangunan sekali pakai	0,-
12	Beban peralatan perikanan sekali pakai	0,-
13	Beban cinderamata	0,-
14	Beban alat olah raga habis pakai	0,-
15	Beban karangan bunga/bunga tabur	0,-
16	Beban pakan ikan/ternak	0,-
17	Beban pupuk	0,-
18	Beban make up	0,-
19	Beban umbul(umbul/bendera	0,-
20	Beban spanduk/baliho/banner	0,-
21	Beban alat penunjang kesehatan/kedokteran habis pakai	0,-
22	Beban bahan baku bangunan	0,-
23	Beban bahan/bibit tanaman	0,-
24	Beban bibit ternak	0,-
25	Beban bahan obat(obatan	0,-
26	Beban bahan kimia	0,-
27	Beban bahan makanan	0,-
28	Beban bahan sandang	0,-
29	Beban bahan baku praktek/pelatihan	0,-
30	Beban perlengkapan praktek/sosialisasi/pelatihan/bimtek	0,-
31	Beban bahan/sampel uji lab	0,-
32	Beban cetak	0,-
33	Beban belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak	13.754.700,-
34	Beban makanan dan minuman rapat	2.850.000,-
35	Beban makanan dan minuman tamu	0,-

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

No.	Beban Persediaan	Realisasi
36	Beban makanan dan minuman kegiatan tertentu	0,-
37	Beban makanan dan minuman pasien	0,-
38	Beban pakaian dinas kepala daerah dan wakil kepala daerah	0,-
39	Beban pakaian sipil harian (PSH)	0,-
40	Beban pakaian sipil lengkap (PSL)	0,-
41	Beban pakaian dinas harian (PDH)	0,-
42	Beban pakaian dinas upacara (PDU)	0,-
43	Beban pakaian sipil resmi (PSR)	0,-
44	Beban pakaian dinas lapangan (PDL)	0,-
45	Beban pakaian kerja lapangan	0,-
46	Beban pakaian adat daerah	0,-
47	Beban pakaian batik tradisional	0,-
48	Beban pakaian olah raga	0,-
49	Beban pakaian seragam	0,-
50	Beban pakaian kegiatan tertentu	0,-
51	Beban hadiah barang	0,-
52	Beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	0,-
53	Beban barang yang akan dijual kepada masyarakat/pihak ketiga (barang jadi)	0,-
54	Beban jasa servis dan penggantian suku cadang	0,-
	Jumlah	16.604.700,-

(2) Beban Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; belanja pelatihan/kursus; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Beban Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 184.189.402 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.5 : Realisasi Beban Jasa Tahun 2021

No	Beban jasa	Realisasi 2021
1	Beban telepon	1.185.719,-
2	Beban air	0,-
3	Beban listrik	0,-
4	Beban jasa pengumuman lelang/pemenang lelang	0,-
5	Beban surat kabar/majalah	0,-
6	Beban kawat/faksimili/internet	70.934.988,-
7	Beban paket/pengiriman	0,-
8	Beban sertifikasi	0,-
9	Beban jasa transaksi keuangan	0,-
10	Beban jasa administrasi pemungutan retribusi parkir	0,-
11	Beban jasa siaran radio	0,-
12	Beban jasa transportasi/akomodasi	0,-
13	Beban dokumentasi	0,-
14	Beban dekorasi	0,-
15	Beban jasa tera/kir	0,-
16	Beban jasa promosi/publikasi/advertising	0,-
17	Beban jasa gelombang radio/televi	0,-

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

No	Beban jasa	Realisasi 2021
18	Beban jasa pemeliharaan kesehatan bupati/wakil bupati	0,-
19	Beban jasa uji laboratorium	0,-
20	Beban jasa cleaning service	0,-
21	Beban pajak bumi dan bangunan	0,-
22	Beban pajak air tanah	0,-
23	Beban jasa tenaga keamanan	0,-
24	Beban penggantian transport	0,-
25	Beban jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli	0,-
26	Beban jasa pendukung kegiatan	0,-
27	Beban jasa laundry	0,-
28	Beban jasa administrasi pemungutan PBB P2	0,-
29	Beban jasa juri/wasit	0,-
30	Beban jasa petugas korsik dan drum band	0,-
31	Beban jasa penata rias/make up	0,-
32	Beban jasa event organizer	0,-
33	Beban jasa fumigasi	0,-
34	Beban jasa siaran televisi	0,-
35	Beban jasa pembuatan video	0,-
36	Beban jasa kalibrasi alat kesehatan	0,-
37	Beban jasa pengolahan limbah medis	0,-
38	Beban jasa pemeliharaan kesehatan DPRD	0,-
39	Beban jasa penyelenggaraan diklat	0,-
40	Beban jasa sewa pengharum ruangan	0,-
41	Beban retribusi pelayanan persampahan	0,-
42	Beban jasa perawatan kesehatan ibu dan bayi resiko tinggi	0,-
43	Beban premi asuransi kesehatan	10.605.305,-
44	Beban premi asuransi ketenagakerjaan	963.390,-
45	Beban sewa gedung/kantor/tempat	0,-
46	Beban sewa ruang rapat/pertemuan	0,-
47	Beban sewa tanah/lahan	0,-
48	Beban sewa penginapan	0,-
49	Beban sewa sarana mobilitas darat	0,-
50	Beban sewa eskavator	0,-
51	Beban sewa mesin proses	0,-
52	Beban sewa electric generating set	0,-
54	Beban sewa alat kantor	0,-
55	Beban sewa alat rumah tangga	0,-
56	Beban sewa komputer	0,-
57	Beban sewa meja dan kursi	0,-
58	Beban sewa alat studio	0,-
59	Beban sewa barang bercorak kebudayaan	0,-
60	Beban sewa tenda dan perlengkapannya	0,-
61	Beban beasiswa tugas belajar S1	0,-
62	Beban beasiswa tugas belajar S2	0,-
63	Beban kursus(kursus singkat/pelatihan)	0,-
64	Beban sosialisasi	0,-
65	Beban bimbingan teknis	0,-
66	Beban pendidikan struktural	0,-
67	Beban fit and proper test	0,-
68	Beban jasa konsultasi penelitian	0,-
69	Beban jasa konsultasi perencanaan	0,-
70	Beban jasa konsultasi pelaporan	0,-
71	Beban jasa konsultasi pengawasan	0,-
72	Beban jasa konsultasi hukum	0,-
73	Beban jasa konsultasi IT	0,-
74	Beban jasa konsultasi evaluasi	0,-
75	Beban jasa konsultasi psikologi	0,-
76	Beban upah/ongkos tenaga kerja harian	0,-
77	Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan	100.500.000,-
78	Beban upah/ongkos tenaga kerja borongan	0,-
79	Beban tambahan upah tenaga kerja bulanan	0,-
80	Beban upah/ongkos tenaga pendidik	0,-
81	Beban tambahan upah tenaga kerja pendidik	0,-
82	Beban Barang dan Jasa pada BLUD	0,-
83	Beban kursus(kursus singkat/pelatihan)	0,-

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

No	Beban jasa	Realisasi 2021
84	Beban bimbingan teknis	0,-
85	Beban praktek industri	0,-
86	Beban Praktek Klinik	0,-
87	Beban Ujian	0,-
88	Beban peta	0,-
89	Beban operasional pemeriksaan internal reguler	0,-
90	Beban Jasa Dana BOS	0,-
	Jumlah	184.189.402,-

(3) Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Beban Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 23.732.080,- terinci sebagai berikut.

Tabel 3.6 : Realisasi Beban Pemeliharaan tahun 2021

No	Beban Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
1	Beban bahan bakar minyak dan pelumas	8.352.000,-	6.812.080,-
2	Beban jasa servis dan penggantian suku cadang	0,-	0,-
3	Beban jasa kir kendaraan dinas/operasional	0,-	0,-
4	Beban STNK kendaraan dinas/operasional	0,-	0,-
5	Beban pemeliharaan grader	0,-	0,-
6	Beban pemeliharaan excavator	0,-	0,-
7	Beban pemeliharaan asphalt equipment	0,-	0,-
8	Beban pemeliharaan electric generating set	0,-	0,-
9	Beban pemeliharaan pompa	0,-	0,-
10	Beban pemeliharaan kendaraan bermotor perorangan	0,-	0,-
11	Beban pemeliharaan kendaraan bermotor berpenumpang	0,-	0,-
12	Beban pemeliharaan kendaraan bermotor angkutan barang	0,-	0,-
13	Beban pemeliharaan kendaraan bermotor khusus	0,-	0,-
14	Beban pemeliharaan kendaraan bermotor beroda dua	0,-	0,-
15	Beban pemeliharaan kendaraan bermotor beroda tiga	0,-	0,-
16	Beban pemeliharaan kendaraan tak bermotor angkutan barang	0,-	0,-
17	Beban pemeliharaan alat angkut apung bermotor berpenumpang	0,-	0,-
18	Beban pemeliharaan alat angkut apung tak bermotor berpenumpang	0,-	0,-
19	Beban pemeliharaan alat kalibrasi	0,-	0,-
20	Beban pemeliharaan alat ukur lainnya	0,-	0,-
21	Beban pemeliharaan alat prosesing	0,-	0,-
22	Beban pemeliharaan alat pemeliharaan tanaman	0,-	0,-
23	Beban pemeliharaan mesin tik	0,-	0,-
24	Beban pemeliharaan alat reproduksi (pengganda)	0,-	0,-
25	Beban pemeliharaan alat penyimpanan perlengkapan kantor	0,-	0,-
26	Beban pemeliharaan office use	0,-	0,-
27	Beban pemeliharaan meubelair	0,-	0,-
28	Beban pemeliharaan alat pembersih	0,-	0,-
29	Beban pemeliharaan alat pendingin	0,-	0,-
30	Beban pemeliharaan alat dapur	0,-	0,-
31	Beban pemeliharaan home use	0,-	0,-
32	Beban pemeliharaan alat pemadam kebakaran	0,-	0,-
33	Beban pemeliharaan computer-PeralatanKomputer-Peralatan Personal Komputer	16.920.000,-	16.920.000,-
34	Beban pemeliharaan personal computer	0,-	0,-
35	Beban pemeliharaan peralatan personal komputer	0,-	0,-
36	Beban pemeliharaan peralatan jaringan	0,-	0,-
37	Beban pemeliharaan kursi kerja pejabat	0,-	0,-
38	Beban pemeliharaan peralatan studio visual	0,-	0,-
39	Beban pemeliharaan peralatan studio video dan film	0,-	0,-
40	Beban pemeliharaan alat komunikasi telephone	0,-	0,-

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

No	Beban Pemeliharaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021
41	Beban pemeliharaan alat komunikasi radio SSB	0,-	0,-
42	Beban pemeliharaan alat komunikasi radio HF/FM	0,-	0,-
43	Beban pemeliharaan alat komunikasi radio VHF	0,-	0,-
44	Beban pemeliharaan alat kedokteran umum	0,-	0,-
45	Beban pemeliharaan alat kedokteran gigi	0,-	0,-
46	Beban pemeliharaan alat rontgen	0,-	0,-
47	Beban pemeliharaan alat kesehatan kebidanan dan penyakit kandungan	0,-	0,-
48	Beban pemeliharaan alat kesehatan perawatan	0,-	0,-
49	Beban pemeliharaan alat kesehatan olah raga	0,-	0,-
50	Beban pemeliharaan alat laboratorium bahan bangunan konstruksi	0,-	0,-
51	Beban pemeliharaan alat laboratorium aspal cat & kimia	0,-	0,-
52	Beban pemeliharaan alat laboratorium mekanik tanah dan batuan	0,-	0,-
53	Beban pemeliharaan alat laboratorium umum	0,-	0,-
54	Beban pemeliharaan alat laboratorium kedokteran	0,-	0,-
55	Beban pemeliharaan alat laboratorium fisika	0,-	0,-
56	Beban pemeliharaan alat laboratorium pertanian	0,-	0,-
57	Beban pemeliharaan alat laboratorium biologi	0,-	0,-
58	Beban pemeliharaan alat laboratorium lingkungan	0,-	0,-
59	Beban pemeliharaan bangunan gedung kantor	0,-	0,-
60	Beban pemeliharaan bangunan kesehatan	0,-	0,-
61	Beban pemeliharaan bangunan gedung tempat ibadah	0,-	0,-
62	Beban pemeliharaan bangunan gedung tempat pendidikan	0,-	0,-
63	Beban pemeliharaan bangunan gedung tempat olah raga	0,-	0,-
64	Beban pemeliharaan bangunan gedung pertokoan/koperasi pasar	0,-	0,-
65	Beban pemeliharaan bangunan stasiun bus	0,-	0,-
66	Beban pemeliharaan bangunan gedung perpustakaan	0,-	0,-
67	Beban pemeliharaan bangunan pengujian kelaikan	0,-	0,-
68	Beban pemeliharaan bangunan taman/wisata/rekreasi	0,-	0,-
69	Beban pemeliharaan rumah negara golongan I	0,-	0,-
70	Beban pemeliharaan rumah negara golongan II	0,-	0,-
71	Beban pemeliharaan rumah negara golongan III	0,-	0,-
72	Beban pemeliharaan flat/rumah susun	0,-	0,-
73	Beban pemeliharaan bangunan bersejarah	0,-	0,-
74	Beban pemeliharaan tugu/tanda batas	0,-	0,-
75	Beban pemeliharaan rambu bersuar	0,-	0,-
76	Beban pemeliharaan jalan kabupaten/kota	0,-	0,-
77	Beban pemeliharaan penunjang jalan kabupaten/kota	0,-	0,-
78	Beban pemeliharaan jembatan kabupaten/kota	0,-	0,-
79	Beban pemeliharaan bangunan pembawa irigasi	0,-	0,-
80	Beban pemeliharaan bangunan pengaman air kotor	0,-	0,-
81	Beban pemeliharaan air tanah dalam	0,-	0,-
82	Beban pemeliharaan instalasi air tanah dangkal	0,-	0,-
83	Beban pemeliharaan instalasi air buangan domestik	0,-	0,-
84	Beban pemeliharaan instalasi pengolahan sampah organik	0,-	0,-
85	Beban pemeliharaan instalasi gardu listrik induk	0,-	0,-
86	Beban pemeliharaan jaringan transmisi	0,-	0,-
87	Beban pemeliharaan jaringan distribusi	0,-	0,-
88	Beban pemeliharaan jaringan telepon di atas tanah	0,-	0,-
89	Beban pemeliharaan barang-barang perpustakaan	0,-	0,-
90	Beban pemeliharaan barang bercorak kebudayaan	0,-	0,-
91	Beban pemeliharaan tanaman	0,-	0,-
92	Beban pemeliharaan aset tidak berwujud	0,-	0,-
93	Beban pemeliharaan taman	0,-	0,-
94	Beban Pemeliharaan Dana BOS	0,-	0,-
	Jumlah	25.272.000,-	23.732.080,-

(4) Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Beban Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. 15.121.500,- terinci sebagai berikut.

Tabel 3.7 : Realisasi Beban Perjalanan Dinas tahun 2021

No.	Beban Perjalanan Dinas	Anggaran 2021	Realisasi
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,-	0,-
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	31.100.000,-	15.121.500,-
	Jumlah	41.100.000,-	15.121.500,-

2. Beban Barang Jasa lainnya Rp. 0,-

a. Pemakaian persediaan awal tahun 2021 sejumlah Rp. 3.465.687,-

NO.	NAMA PERSEDIAAN	NILAI
1.	Alat Tulis Kantor	Rp 2.867.687,00
2.	Barang Cetak	Rp 172.000,00
3.	Alat Listrik dan Elektronik	Rp. 0,00
4.	Perangko, Materai dan Benda Pos	Rp. 60.000,00
5.	Peralatan Kebersihan/Bhn Pembersih	Rp. 366.000,00
6.	Bahan Bangunan	Rp. 0,00
7.	Bibit Tanaman	Rp. 0,00
8.	Obat-obatan	Rp. 0,00
9.	Bahan Makanan Pokok	Rp. 0,00
10.	Pupuk / Pestisida	Rp. 0,00
11.	Hewan / Ternak	Rp. 0,00
12.	Barang Pakai Habis Lainnya	Rp. 0,00
	Jumlah	Rp. 3.465.687,00

b. Mengeluarkan beban karena ada sisa persediaan yang dipakai sehingga dengan nominal (Rp. 46.142.718,00)

NO.	NAMA PERSEDIAAN	NILAI
1.	Alat Tulis Kantor	Rp 39.566.538,00
2.	Barang Cetak	Rp 6.576.180,00
3.	Alat Listrik dan Elektronik	Rp. 0,00
4.	Perangko, Materai dan Benda Pos	Rp 0,00
5.	Peralatan Kebersihan/Bhn Pembersih	Rp. 0,00
6.	Bahan Bangunan	Rp. 0,00
7.	Bibit Tanaman	Rp. 0,00
8.	Obat-obatan	Rp. 0,00
9.	Bahan Makanan Pokok	Rp. 0,00

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 2021 Bagian PBJ

10.	Pupuk / Pestisida	Rp.	0,00
11.	Hewan / Ternak	Rp.	0,00
12.	Barang Pakai Habis Lainnya	Rp.	0,00

- c. Penambahan mutasi dropping persediaan dari Bagian Umum Setda Kabupaten Lumajang sejumlah Rp. 48.289.904,- yang terdiri dari :

Beban barang pakai habis ATK Rp. 42.890.084,-

Beban barang pakai habis cetakan Rp. 5.399.820,-

(sebagaimana terlampir)

- d. Pembayaran Utang Belanja Tahun 2020 sebesar Rp. 15.167.499,-
 e. Pembebanan Utang Belanja Tahun 2021 sebesar Rp. 17.252.656,-

31 Desember 2021

(Rp)

69.663.704,60

3) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban penyusutan aset tetap/amortisasi aset tak berwujud menggunakan metode garis lurus.

Beban penyusutan dan amortisasi tahun 2021 sebesar Rp 69.663.704,60 sebagai berikut.

Tabel Daftar Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021

dalam rupiah

No	Beban Penyusutan	Tahun 2021
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	47.905.704,60
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi & Jaringan	0,00
4	Beban Penyusutan Aset tetap Lainnya	0,00
	Jumlah Beban Penyusutan Aset Tetap	47.905.704,60
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	21.758.000,00
	Jumlah	69.663.704,60

VI. INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

a. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah(naskah kuno, bukti(bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain :

- 1) Prasasti Mula Malurung
- 2) Naskah Negara Kertagama
- 3) Kitab Pararaton
- 4) Kidung Harsa Wijaya
- 5) Kitab Pujangga Manik
- 6) Serat Babat Tanah Jawi
- 7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa(penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut(turut dipimpin oleh:

- 1) KRY Kertodirejo (1928 (1941);
- 2) R. Abu Bakar (1941 (1948);
- 3) R. Sastrodikoro (1948 (1959);
- 4) R. Sukardjono (1959 (1966);
- 5) N.G. Subowo (1966 (1973);
- 6) Suwandi (1973 (1983);
- 7) Karsid (1983 (1988);
- 8) H.M. Samsi Ridwan (1988 (1993);

- 9) Tarmin ariyadi (1993 (1998);
- 10) Drs. H. Achmad Fauzi (1998 (2003);
- 11) Drs.H. Achmad Fauzi (H. Hartono, SH, S.Sos (2003 – 2008);
- 12) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA (Drs. As'at (2008 – 2013);
- 13) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA (Drs. As'at (2013 (2018);
- 14) Drs. As'at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, MKes (2014 – 2018)

b. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang :

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.
- 2) Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.

c. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 112° 5' – 113° 22' Bujur Timur dan 7° 52' – 8° 23' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang 1.790,90 KM² atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah Lumajang.

Batas(batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

d. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3(4 bulan pertahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

e. TOPOGRAFI

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan di atas 2000 m di atas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

f. TATA GUNA TANAH

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

- 1) daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);
- 2) lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);
- 3) tegal seluas 59.795 ha (33,39%);
- 4) perkebunan seluas 12.109 ha (6,76%);
- 5) hutan seluas 52.303 ha (29,20%);
- 6) dan lainnya seluas 1.590 ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi

ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

g. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) STRUKTUR KELEMBAGAAN

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Dalam periode tahun 2003 – 2007 penataan kembali fungsi(fungsi kelembagaan telah dilakukan sebanyak 2 kali. Pada tahun 2003 dilakukan penataan berdasarkan PP Nomor 8/2003 dan tahun 2008 berdasarkan PP Nomor 41/2007.

Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 11 Tahun 2018, sebagai dasar pembentukan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa yang berdiri tanggal 1 Pebruari 2018, dan Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa baru mengelola keuangan sendiri pada bulan Oktober 2018.

Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kegiatan di Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Lumajang;
- b. Menyusun kebijakan serta mengevaluasi pelaksanaan strategi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- c. Memberikan pelayanan, konsultasi , koordinasi dan fasilitasi terhadap OPD dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Memfasilitasi dan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan di Bagian Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Mengelola dan memfasilitasi Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- f. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati , melalui Sekretris Daerah; dan

h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

Adapun Tugas dari masing – masing Sub Bagian pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa diantaranya :

1. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa memiliki tugas :

- Menyusun Program kerja Sub Bagian Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
- Menyusun strategi pengadaan barang dan jasa;
- Melaksanakan survei harga pasar terhadap barang dan jasa untuk mendukung penyusunan e-katalog lokal/sektoral;
- Menyusun dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- Mendokumentasikan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- Memfasilitasi dan menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan kelompok kerja;
- Mengelola informasi kontrak;
- Membantu perencanaan dan review terhadap paket pengadaan barang dan jasa;
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dalam laporan kinerja individu;
- Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan sub bagian tugasnya;

2. Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik tugas :

- Menyusun Program Kerja dan Kegiatan pada Sub Bagian Pengelola Layanan Pengadaan secara Elektronik;
- Menginventarisasi rencana umum pengadaan barang dan jasa;
- Mengelola seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa beserta instrukturnya;
- Melaksanakan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
- Mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan;
- Melayani informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada masyarakat luas;
- Memfasilitasi dan implementasi standarisasi Layanan Pengadaan secara Elektronik;
- Melakukan bimbingan teknis, pendampingan dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa antara lain: SiRUP,SPSE,e-katalog, e-monev,SIKAp;
- Mengelola informasi hasil pengadaan barang dan jasa;
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik dalam laporan kinerja individu;
- Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan

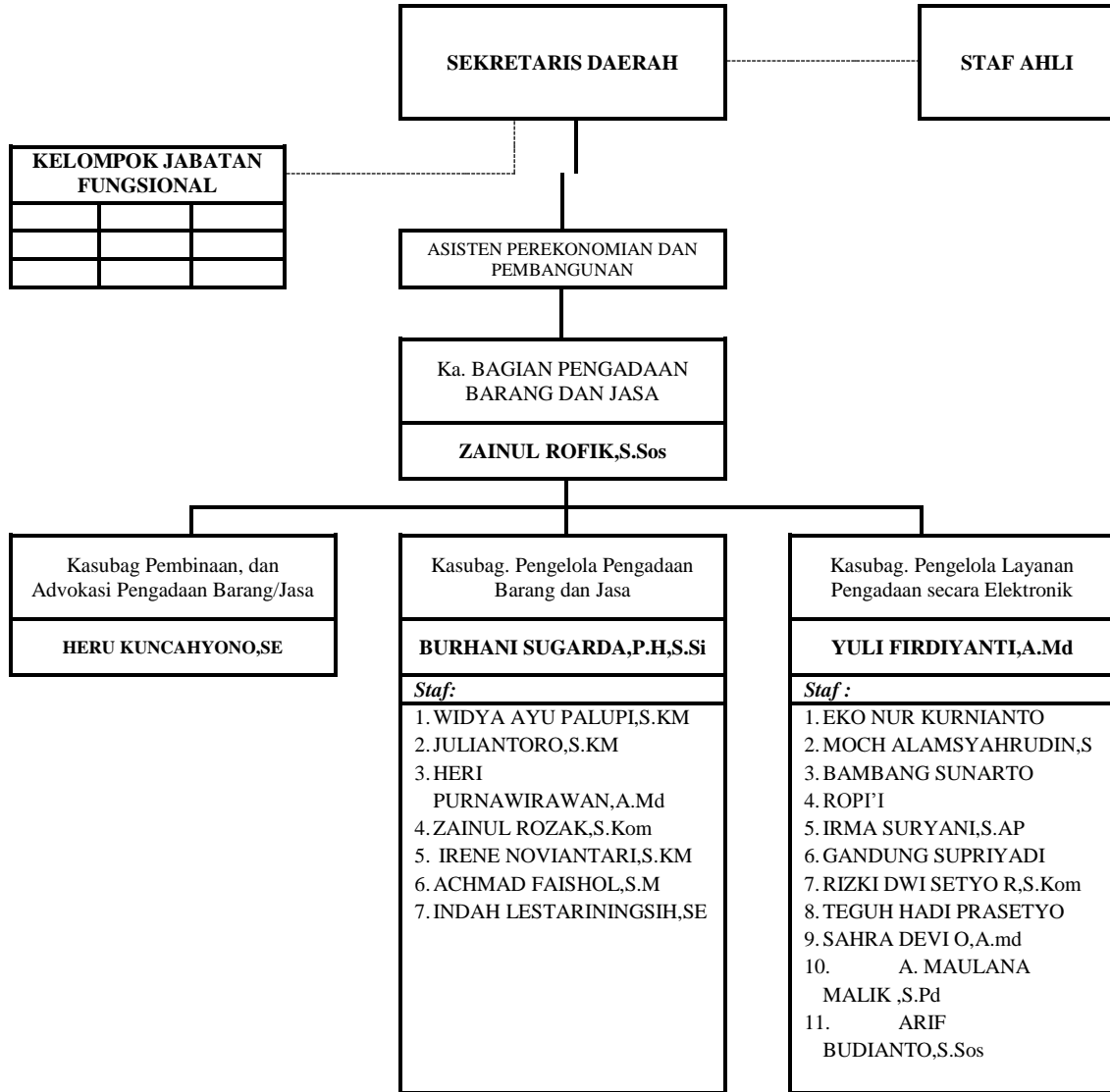
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan sub bagian tugasnya;

3. Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas :

- Menyusun Program Kerja dan Kegiatan Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- Melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama para pengelola pengadaan barang dan jasa Personil UKPBJ;
- Mengelola dan mengukur tingkat kematangan UKPBJ;
- Mengelola personil UKPBJ;
- Mengembangkan sistem insentif UKBJ;
- Mengelola dan pengukuran kinerja pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Mengelola manajemen pengetahuan pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Membina hubungan dengan para pemangku kepentingan;
- Melakukan bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang dan jasa;
- Menyusun, mengendalikan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa;
- Mengelola informasi manajemen pembangunan dan hasil pengadaan barang dan jasa;
- Melakukan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Laporan Kinerja Individu;
- Memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah – langkah dan tindakan – tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan sub bagian tugasnya;

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Sesuai dengan PERBUP Lumajang Nomor 73 Tahun 2020



VII. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang
 - e) Kewajiban(kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
 - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
 - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 terdiri:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas pemerintah daerah pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan, aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
 - (5) Laporan Perubahan SAL yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya Pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.
 - (6) Neraca daerah yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2021.

- (7) serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.
3. Laporan keuangan pemerintah daerah juga dilengkapi dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah tahun 2021 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan laporan keuangan.

